

# REPRESENTASI TKI DI SURAT KABAR INDONESIA: KAJIAN WACANA DAN KOGNISI MELALUI STUDI KORPUS

## (REPRESENTATION OF INDONESIAN LABOR ON INDONESIAN MEDIA: A DISCOURSE AND COGNITION STUDY THROUGH CORPUS STUDY)

**Elvi Citraesmana**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung–Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363  
Ponsel: 08122024749  
Pos-el: elvi.citraesmana@unpad.ac.id

**Erlina**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung–Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363  
Ponsel: 08122024749  
Pos-el: erlina@unpad.ac.id

**Rosaria Mita Amalia**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung–Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363  
Ponsel: 08122024749  
Pos-el: rosaria.mita.amalia@unpad.ac.id

Tanggal naskah masuk: 15 Desember 2017  
Tanggal revisi terakhir: 28 Mei 2018

### *Abstract*

*The aim of this article is to study how TKI is represented on Indonesian newspapers using discourse and cognition based on corpus studies. This article uses the theory of Discourse and Cognition proposed by Graesser and Millis (in Van Dijk, 2009) and the theory of Media Discourse Analysis written by Eriyanto (2001). The source of the data are 10 Indonesian online newspapers. This research is a corpus based study using Antconc software which was able to get 2949 tokens from which the word “government” frequently collocates with the word “TKI”. The result shows that the “government” is represented in negative ways both in inference levels and discourse strategy while the “TKI” is represented in a good way as a weak party and as the victim.*

**Keywords:** *TKI, representation, discourse, media, corpus*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana TKI direpresentasikan dalam surat kabar Indonesia melalui pendekatan wacana dan kognisi dengan pengumpulan data menggunakan metode korpus. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Wacana dan Kognisi yang diajukan oleh Graesser and Millis (dalam Van Dijk, 2009) dan Analisis Wacana Teks Media yang ditulis oleh Eriyanto (2001). Sumber data terdiri atas 10 surat kabar daring nasional. Metode yang digunakan adalah metode korpus linguistik dengan menggunakan perangkat lunak Antconc. Data yang terjaring sebanyak 2.949 kata dengan frekuensi tertinggi adalah “pemerintah” yang terkait dengan “TKI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah direpresentasikan secara negatif, baik melalui tataran inferensi maupun strategi wacana. Sementara itu, TKI direpresentasikan secara positif sebagai pihak yang lemah dan menjadi korban.

**Kata kunci:** TKI, representasi, wacana, media, korpus

## 1. Pendahuluan

Menjadi TKI seharusnya memberikan solusi pada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Dengan mengirimkan para TKI, Indonesia akan mengalami peningkatan devisa negara yang dianggap cukup signifikan. Dengan demikian, hubungan antara TKI dan pemerintah Indonesia akan saling menguntungkan secara ekonomi. Akan tetapi, pengiriman TKI ini memberikan dampak jauh di luar perkiraan. Hal ini terjadi bukan hanya ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang memahami budaya negara setempat, tetapi juga hal ini terjadi karena kekurangsabaran para TKI untuk segera berangkat dan bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada bekerja di Indonesia. Mereka ingin cepat kaya, salah satu motivasi para TKI bekerja di luar negeri. Namun, tidak hanya ingin menjadi kaya, sebagian besar para TKI ini memiliki kebutuhan hidup yang lain yang bukan hanya kebutuhan hidup rumah tangganya saja melainkan juga mencukupi kebutuhan hidup keluarga besar mereka.

Surat kabar nasional Indonesia telah mengupas persoalan TKI berulang kali. Pemberitaan TKI di media juga dikaji melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis ataupun Analisis Tekstual.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji representasi TKI menggunakan pendekatan Wacana dan Kognisi (*Discourse and Cognition*) yang diajukan oleh Graesser dan Millis (dalam Van Dijk, 2009).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode statistik deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan *software* Antconc. Frekuensi kata TKI melalui *software* muncul sebanyak 86 token. Melalui Cluster/N-gram, TKI muncul sebanyak 47 tipe klaster. Melalui daftar kata (*wordlist*), jumlah kata yang terhimpun di dalam 10 surat kabar nasional daring sebanyak 2949 token dan terbagi ke dalam 966 tipe kata. Dari 966 tipe kata tersebut frekuensi kemunculan TKI yang berkolokasi dengan pemerintah muncul sebanyak 25 kali, dengan *ketenagakerjaan* muncul sebanyak 24 kali, dengan kata *ilegal* muncul sebanyak 22 kali, dengan *Indonesia* dan *Saudi* muncul sebanyak 21 kali, dengan *Arab*,

*polisi*, dan *bpjs* muncul sebanyak 14 kali, dengan *negara* dan *perlindungan* muncul sebanyak 12 kali, dengan *kementerian* muncul sebanyak 11 kali, dan dengan *atase* muncul sebanyak 10 kali. Selebihnya adalah kata yang tidak frekuentatif muncul di dalam surat kabar nasional daring yang terkait dengan pemberitaan TKI. Pemerintah ternyata memiliki peran yang cukup penting terkait isu TKI. Hal ini dapat dipahami melalui kemunculan kata *pemerintah* yang sangat frekuentatif tersebut. Purposif data, yaitu kata *pemerintah* yang paling frekuentatif muncul di dalam surat kabar tersebut, dikumpulkan dan diklasifikasikan yang mengacu pada teori Graesser dan Millis (dalam Van Dijk, 2009) yang membagi ke dalam 4 bentuk inferensi. Inferensi yang muncul dapat menghasilkan representasi partisipan. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode statistik deskriptif, yaitu data dikumpulkan secara frekuentatif dan dianalisis secara kualitatif.

## 2. Kerangka Teori

Menurut Graesser dan Millis (dalam Van Dijk, 2009:126), terdapat lima tataran di dalam penelitian wacana dalam tradisi kognitif, seperti (1) kode di tingkat dasar (kata dan sintaksis); (2) tataran tekstual (representasi semantis dalam teks yang eksplisit); (3) model situasional (topik apa yang sedang dibicarakan, partisipan baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, objek, pernyataan tentang apa, peristiwa yang sedang berlangsung, tindakan, proses yang dilakukan, sasaran tujuan, dan topik apa pun yang sedang dibicarakan di dalam wacana); (4) genre dan struktur retorik; (5) komunikasi secara pragmatis.

Lebih lanjut, Graesser dan Millis (dalam Van Dijk, 2009:127) menjelaskan bahwa makna inferensi dibutuhkan untuk mengonstruksi paling tidak kelima tataran tersebut. Oleh karena itu, Graesser dan Millis (dalam Van Dijk, 2009:127) mengajukan empat bentuk inferensi, yaitu

(1) *Superordinate goal*;

*'The murderer wanted to turn himself into the police'*

Frasa verba *wanted to turn himself into..* menginferensikan bahwa pembunuh ini telah mengakui perbuatannya. Bentuk *past tense* dari verba *wanted* mengindikasikan adanya niat yang ingin dicapai atau ingin dilakukan. *Superordinate goal* ini dapat

diamati melalui kata yang bersifat generik.

- (2) *Subordinate goal/action*;  
'*The murderer dialled a telephone number*'

Verba *dialled* dalam bentuk *past time* menginferensikan bahwa pembunuh itu telah menelepon. Tataran *subordinate goal/action* ini dapat diamati dari kata yang bersifat lebih spesifik, seperti penggunaan kata '*dialled*' sebagai verba tindakan yang dilakukan di waktu lampau. Melalui contoh ini, dapat diamati bahwa pembunuh telah melakukan sesuatu dengan menekan tombol telepon.

- (3) *Causal antecedent*;  
'*The murderer changed his mind*'

Contoh ini menginferensikan adanya kepanikan dalam diri pembunuh karena kemudian dia berubah pikiran '*...changed his mind*'.

- (4) *Causal consequence*;  
'*The murderer tried to escape*'

contoh dalam tataran ini pun menginferensikan adanya kepanikan karena kemudian pembunuh tersebut berusaha untuk kabur yang dapat diamati pada frasa verba '*...tried to escape*'.

Pemahaman yang ditulis oleh Graesser dan Millis ini akan digunakan sebagai rujukan di dalam menganalisis data dengan tujuan untuk menganalisis makna inferensi apa sajakah yang muncul di dalam artikel berita tentang TKI yang dimuat di sepuluh surat kabar nasional daring tersebut. Makna inferensi tersebut akan menghasilkan sebuah representasi terhadap partisipan. Partisipan dalam hal ini adalah TKI.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam uraian subbab berikut teks muncul di dalam artikel terkait TKI dengan kata kunci *pemerintah*.

#### 3.1 Superordinate Goal

Data (1) *Saat ini, pemerintah hanya memiliki atnaker di empat negara, yakni Arab Saudi (di Riyadh), Kuwait, Malaysia dan Uni Emirat Arab.*

Data (2) *keterwakilan pemerintah RI dalam hal ketenagakerjaan hanya diwakili oleh staf teknis tenaga kerja.*

[https://news.detik.com/berita/d-3471791/lindungi-tnk-atase-ketenagakerjaan-di-luar-negeri-ditambah?utm\\_source=28582](https://news.detik.com/berita/d-3471791/lindungi-tnk-atase-ketenagakerjaan-di-luar-negeri-ditambah?utm_source=28582)

Data (1) dan (2) menginferensikan bahwa pemerintah secara umum memiliki masalah adanya keterbatasan tenaga dalam hal menangani TKI. Data ini diperoleh dari News.detik.com yang merupakan surat kabar nasional pemerintah. Dalam hal ini berita yang disampaikan adalah berita yang mengandung makna positif. Hal ini dapat dilihat dari posisi *pemerintah* yang ditempatkan sebagai subjek yang digambarkan sebagai agen (inisiator) yang melakukan suatu tindakan, tetapi ditulis dengan menggunakan bentuk kalimat semi pasif dan pasif berikut *Pemerintah hanya memiliki atnaker di empat negara... dan keterwakilan Pemerintah RI .... hanya diwakili oleh staf teknis tenaga kerja.* Melalui kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa tercapai *superordinate goal*, yaitu tujuan umum pemberitaan dengan menggunakan strategi ekskomunikasi (*excommunication*) pihak TKI tidak diberikan suara, tetapi pihak pemerintahlah yang menjadi fokus pemberitaan, penggambaran hanya terjadi pada pihak pemerintah (Eriyanto, 2001:121).

#### 3.2 Subordinate Goal/Action

##### A. Strategi Eksklusi

Data (3) *Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani menekankan pemerintah bahwa saat ini merupakan waktunya mereka serius membantu bupati Indramayu mewujudkan Desa Migran Produktif (Desmigratif).*

Data (4) *Dewi juga menginginkan pemerintah tidak melakukan pelarangan bagi TKI perempuan.*

Data (5) *Seharusnya pemerintah bisa memberikan solusi bagi mereka kaum perempuan yang telah memiliki anak dan ingin mendapatkan penghasilan lebih.*

Data (6) *Ini merupakan pahlawan devisa untuk Negara, pemerintah harus mengerti hal ini," tambah dia.*

<http://news.metrotvnews.com/read/2017/04/11/684516/komisi-ix-ini-waktunya-pemerintah-pusat-bantu-indramayu>

*Subordinate goal/action* muncul pada data (3), (4), (5), dan (6) yang tampak pada pilihan

kata yang lebih spesifik, yaitu data (3) ...*waktunya mereka serius membantu bupati Indramayu mewujudkan Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, data (4) *pemerintah tidak melakukan pelarangan bagi TKI perempuan*, data (5) *seharusnya pemerintah bisa memberikan solusi bagi mereka kaum perempuan...*, data (6) ...*pemerintah harus mengerti hal ini*. Ketiga data tersebut pemerintah digambarkan sebagai pihak yang buruk dengan menggunakan strategi eksklusif, yaitu dengan menggambarkan pihak TKI baik dan pihak pemerintah buruk (Eriyanto, 2003:122).

Melalui data tersebut dapat diinferensikan bahwa selama ini pemerintah tidak melakukan kewajibannya secara serius (data 3), tenaga kerja wanita muncul setelah ada tenaga kerja laki-laki (data 4), pemerintah selama ini belum memberikan solusi ataupun mengeluarkan kebijakan terkait tenaga kerja wanita (data 5), pemerintah dianggap tidak memahami persoalan wanita, terutama adalah wanita bekerja (data 6).

## **B. Strategi Delegitimasi**

Data (7) *Pemerintah diminta bijak untuk memanfaatkan peluang kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi*.

Data (8) *Menurut Saleh, selain persoalan dokumen keimigrasian dan izin kerja, masih banyak masalah lain yang belum dapat dituntaskan. Masalah itu butuh kerja sama dengan pemerintah negara penerima TKI*.

Data (9) *Pemerintah yang membuat kebijakan moratorium ya pemerintah bisa mencabutnya kembali*

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/888744-pemerintah-perlu-prioritaskan-bahas-tki-dengan-raja-salman>

Strategi delegitimasi menurut Eriyanto (2001:127) yang dipersoalkan bukan penggambaran yang buruk mengenai partisipan, tetapi bagaimana masing-masing pihak diwacanakan: siapa yang dianggap benar, dianggap absah dalam pertarungan wacana tersebut. Lebih lanjut Eriyanto menambahkan bahwa praktik delegitimasi menekankan bahwa hanya kelompok sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak absah.

Strategi delegitimasi hadir di dalam data (7), (8), (9) berikut. Pada data ini, pemerintah dianggap tidak layak atau tidak benar dalam melakukan suatu kebijakan. Hal ini muncul pada informasi *pemerintah diminta bijak untuk memanfaatkan peluang kunjungan Raja Arab Saudi ... untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi* (data 7); ... *selain persoalan dokumen keimigrasian dan izin kerja, masih banyak masalah lain yang belum dapat dituntaskan...* (data 8); *Pemerintah yang membuat kebijakan moratorium ya pemerintah bisa mencabutnya kembali* (data 9).

Penggunaan *pemerintah diminta bijak...*, *masalah lain yang belum dapat dituntaskan*, dan *pemerintah yang membuat kebijakan moratorium...* menginferensikan bahwa pemerintah sebagai badan eksekutif negara membuat suatu kebijakan yang hasilnya bertolak belakang dengan capaian yang diharapkan.

## **3.3 Causal Antecedent**

Data (11) *Pada 2014, KPK bersama Polri melakukan sidak ke terminal TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Terlalu banyak informasi soal pemerasan, pemaksaan, dan pungli. Tak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tapi juga para aparat pemerintah, termasuk para aparat penegak hukum, kata Basaria*.

<http://koranbanteng.com/kpk-duit-pemerasan-tki-mengalir-ke-pejabat-kementerian>

Data (12) *Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penyekapan dan penyiksaan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia*.

<https://www.gatra.com/nusantara/nasional/254196-migrat-care-desak-pemerintah-mengusut-penyekapan-tkw-di-arab-saudi>

Menjadi TKI bukanlah tanpa sebab, pun menjadi TKI yang bermasalah atau ilegal bukan pula tanpa sebab. Pada data persoalan ini muncul pada data (11) dan (12). Pemerintah dianggap pihak yang ikut terlibat sebagai penyebab nasib buruk para TKI. Hal ini dapat diamati dari kalimat berikut *Terlalu banyak informasi soal pemerasan, pemaksaan dan pungli. Tak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tapi juga*

*para aparat pemerintah... (data 11); ...mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penyekapan dan penyiksaan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia (data 12).*

Melalui informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dimarginalkan di dalam strategi wacana ini. Hal ini dapat diamati dari penggunaan *...pemerasan, pemaksaan, dan pungli. Tak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tapi juga para aparat pemerintah...* dan penggunaan kata *mendesak* menginferensikan pemerintah lambat dalam menangani kasus-kasus TKI.

### 3.4 Causal Consequence

Data (10) Jules menjelaskan, dari laporan yang diterima dari pihak Polres Kupang, diketahui sejumlah calon TKI itu hanya membawa sejumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga. Sementara surat-surat keterangan dari pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten sendiri tidak ada.

<http://news.okezone.com/read/2017/03/30/340/1654432/polisi-gagalkan-pengiriman-13-calon-tki-ilegal>

Akibat perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maka para TKI ini melakukan tindakan jalan pintas. Hal ini muncul pada data (10) Jules menjelaskan, dari laporan yang diterima dari pihak Polres Kupang, diketahui sejumlah calon TKI itu hanya membawa sejumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga. Sementara

*surat-surat keterangan dari pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten sendiri tidak ada.*

Data (10) menginferensikan bahwa jumlah TKI sebagai korban tidaklah sedikit. Hal ini dipahami dari informasi *sejumlah calon TKI...*

## 4. Penutup

### 4.1 Simpulan

Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tataran inferensi, yaitu *superordinate goal, subordinate goal/action, causal antecedent*, dan *causal consequence* yang muncul pada pemberitaan TKI. Keempat tataran inferensi tersebut menggunakan 4 strategi wacana, yaitu strategi ekskomunikasi, strategi eksklusif, strategi delegitimasi, dan strategi marginalisasi.

Melalui strategi ekskomunikasi, pemerintah direpresentasikan secara positif; melalui strategi eksklusif dan delegitimasi, pemerintah direpresentasikan secara negatif; melalui strategi marginalisasi, pemerintah direpresentasikan secara buruk karena melakukan pemerasan terhadap TKI dan lambat dalam menangani kasus-kasus terkait TKI; dalam tataran *causal consequence*, TKI direpresentasikan positif karena dianggap sebagai korban.

### 4.2 Saran

Penelitian ini diharapkan menjadi pemicu bagi penelitian sejenis dan memperdalam dengan memperluas populasi dan sampel atau memperluas variabel-variabel penelitiannya.

## Daftar Pustaka

- Brown, Gillian and Yule, George. 1983. *Discourse Analysis* (Analisis Wacana). Translation edited by I. Soetikno. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cummings, Louise. 1999. *Pragmatics, A Multidisciplinary Perspective* translated edition. Edited by Prof. Dr. Abdul Syukur Ibrahim. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media*. Jogjakarta: LkiS.
- Graesser, Arthur C and Millis, Kate. 2009. "Discourse and Cognition". In *Discourse Studies* by Van Dijk. London: Sage Publication.
- Graesser, A.C., Mc Namara, D.S., Louwerse, M.M, and Cai, Z. 2004. *Coh-Matrix: Analysis of text on cohesion and language. Behavioural Research Methods, Instruments, and Computers*, 36: 193--202. Cited in Van Dijk (2009).

- Graesser, A.C., Cai, A. Louwrese, M. and Daniels, F. 2006. *Question Understanding Aid (QUAID): A web facility that helps survey methodologists improve the comprehensibility of questions*. *Public Opinion Quarterly*, 70: 3--22. Cited in Van Dijk (2009).
- Johnson, Marcia K., John D. Bransford and Susan Solomon. 1973. *Memory for Tacit Implications of Sentences*. Cited in Cummings (1999) translated edition. Edited by Abdul Syukur (2007).
- Pennebaker, J.W., Booth, R.J. and Francis, M.E. 2007. *Linguistic Inquiry and Word Count*. Austin, TX: LIWC.net ([www.liwc.net](http://www.liwc.net)). Cited in Van Dijk. (2009).
- Stubbs, Michael. 2002. *Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics*. UK: Blackwell Publishing.
- Sinclair. 1991. *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.